

ANALISIS BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT KECAMATAN MARPOYAN DAMAI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALIKOTA PEKANBARU

Oleh:

Dedy Haryadi ¹⁾, Zahirman ²⁾, Sri Erlinda ²⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi PKn Universitas Riau

²⁾ Dosen Program Studi PKn Universitas Riau

Email: hardyzavier@gmail.com

Hp 082388011889

ABSTRACT

The research is motivated by the form of community participation in implementing the Peace District Marpoyan up with the implementation of the election ballot Pekanbaru mayor re-election. Due to political decisions are made and implemented by the government concerning and affecting the lives of citizens eligible residents and to determine the content of political decisions. From the results of the vote there is a good response. Formulation of the problem in this research is "How Public Participation Sub Marpoyan Peace On Repeat Voting Pekanbaru mayor". This study aimed to Know Marpoyan District Public Participation Peace In Voting Re-Mayor Pekanbaru. Community participation is an important aspect of democracy. The population in this study is the whole society to participate actively or vote on a ballot re-election as mayor of the 74,797 people that the numbers taken by Morgan & krecjie many as 382 samples. While sampling technique using taknik rondom sampling by Suharsimi Arikunto ie if the subject under study is too much then the sample can be taken 20% of the total population is 76 people. Data were collected through observations, questionnaires, interviews, and engineering libraries. In analyzing the data using descriptive analysis kualitataif.

The results of this study indicate that the District Public Participation In Peace Marpoyan Voting Re-Election Mayor with the percentage of respondents who answered yes by 61.6% and amounted to 38.40% answered No. This phenomenon is supported by Hadi Sutrisno opinion stating that 61.6% were in the range of 51% - 100%, this means that according to Hadi Sutrisno participation form with the category sub Marpoyan Peace participating voting. So the hypothesis that sub Marpoyan Public Participation Peace In Voting Re-Election Mayor of Pekanbaru Participate Vote and acceptable for Public Participation Sub Marpoyan Peace In Voting Re Pemihan Mayor Pekanbaru to the percentage of respondents (61.6%) = Yes.

Keywords: Participation, Community, Repeat Voting

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum didalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "Indonesia

adalah negara hukum”. Demokrasi merupakan wujud dari pemerintahan yang memposisikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi. Hal ini sejalan dengan salah satu amanat yang tertuang didalam UUD 1945 yaitu pada pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Abraham Lincoln mengemukakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, maka dari itu rakyat harus diikutsertakan dalam setiap proses politik di negara ini, baik dalam menentukan pemimpin nasional, mengeluarkan kebijakan, membuat peraturan, dan menikmati hasil pembangunan melalui pemerataan kehidupan.

Pada tanggal 18 Mei 2011 yang lalu, masyarakat Pekanbaru telah melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan salah satu bentuk perubahan demokrasi, dimana pasca Reformasi yang memberikan kebebasan dan otonomi luas pada daerah, yang pada masa Orde Baru selama 32 Tahun mencengkram dan mengekang masyarakat Indonesia. Warisan budaya politik yang mengakar kuat karena memang apa yang dilakukan pada Orde Baru terhadap sistem politik Indonesia masih tertanam dan merasuk dalam mentalitas dan nilai-nilai masyarakat kita maupun pemerintahan secara Nasional dan Lokal.

Udin S.Winataputra (2007:1.4) menyatakan bahwa membentuk masyarakat demokratis itu mahal karena suatu masyarakat tidak dapat hidup demokratis apabila mereka dalam keadaan tidak berpendidikan, bodoh, apatis, dan miskin. Dengan demikian, masyarakat demokratis baru dapat terwujud apabila masyarakatnya berpendidikan, cerdas, memiliki tingkat penghidupan yang cukup (layak), dan mereka punya keinginan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Udin S.Winataputra (2007 :1.1) tugas pendidikan kewarganegaraan apabila dikaitkan dengan demokrasi maka kaitannya sangat erat, dikarenakan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma barunya yakni mengembangkan pendidikan demokrasi mengemban tiga fungsi pokok, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Pada hakikatnya proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral.

Pelaksanaan pilukada langsung merupakan suatu proses politik untuk memilih para kepala daerah secara langsung yang diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tentang pilukada langsung merupakan kemajuan demokrasi di Indonesia yang menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tersebut. Selain UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, adapun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pilukada antara lain yaitu UU RI No. 12 tahun 2008 perubahan atas UU No. 32 tahun 2004, PP No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, PP No. 17 tahun 2005 tentang perubahan atas PP No. 6 tahun 2005, PP No. 49 tahun 2008 perubahan ketiga atas PP No. 6 tahun 2005, serta berbagai peraturan KPU dan Panwaslu.

Bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat Yadov membagi jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

1) *Participation in decision making* (Partisipasi dalam pengambilan keputusan). 2) *Participation in implementation of development programmes and projects* (partisipasi dalam pelaksanaan program dan pembangunan). 3) *Participation in sharing the benefits of development programmes and projects* (partisipasi dalam berbagai manfaat pembangunan). 4) *Participation in monitoring and evaluation of development programmes and projects* “(partisipasi dalam bentuk pengawasan adanya evaluasi program serta proyek).” (Yadov, 1980:87).

Pada awal dilaksanakannya pemilu pada Kota Pekanbaru, sebenarnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru masih relatif rendah. Terbukti pada pemilu yang dilakukan pada bulan Mei tahun lalu, tingkat partisipasi masyarakat Pekanbaru tidak sampai 50% dari jumlah total DPT. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Badan Kesbang Polinmas Kota Pekanbaru, Mayulis Yahya. “Meski berlangsung aman dan tertib, ternyata tingkat partisipasi masyarakat Pekanbaru untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Pekanbaru, Rabu 18 Mei, tidak sampai 50 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 536.113. Bahkan, jauh lebih rendah dari tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2006 lalu, masih di atas 54 persen.”

Tingkat partisipasi masyarakat Pekanbaru pada PSU justru lebih parah, dari jumlah DPT PSU sebanyak 523.633 jumlah pemilih yang ikut mencoblos dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) belum lama ini, yang berpartisipasi ikut mencoblos hanya sebanyak 175.639 orang saja. Atau hanya sekitar 25 persen dari jumlah DPT (zamrudtv.com). Dan fenomena yang ada sementara di Kecamatan Marpoyan Damai pemilih sangat banyak / tinggi jumlahnya, tingginya partisipasi ini menjadi ironis dengan partisipasi di Kecamatan Sail yang rendah, padahal berada sama di Kota Pekanbaru yang mestinya tingkat kesadaran ikut serta dalam tingginya partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota Pekanbaru?

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah:
Untuk Mengetahui Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada di lapangan, maka data yang akan diperoleh akan dianalisa dengan sistem deskriptif kualitatif dengan persentase. (Suharsimi Arikunto, 2002:209).

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada Juli 2012 sampai dengan Desember 2012.

Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai dalam Kota Pekanbaru yang mempunyai kriteria yaitu masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang sudah terdaftar dan mempunyai hak pilih dalam pemilihan Walikota Pekanbaru. Adapun populasi penelitian yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan Walikota Pekanbaru 74.797 orang (Data Camat Marpoyan Damai). Menurut **Morgan & Krecjie** dalam Uma Sekaran (2003:7) jika populasi berkisar 75.000 maka sampel yang diambil sebanyak 382 orang. Dengan mengacu kepada pendapat **Suharsimi Arikunto (2006:112)** menyatakan jika populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya, namun jika populasinya besar maka sampel yang diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. tergantung dari kemampuan penenliti dilihat dari waktu, dana, tenaga, sempit luasnya wilayah pengamatan dari subjek dan besar dan kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti.(menurut Suharsimi Arikunto,2006 :112).

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti menetapkan sampel yaitu 20% dari jumlah populasi yaitu $382 \times 20\%$. Maka diperoleh sampel sebesar 76 orang, dengan teknik random sampling

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data menggunakan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan terperinci dalam menguji hipotesis maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi: Observasi, Wawancara, Angket, Dokumentasi dan Studi Kepustakaan.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dilapangan, maka data yang akan diperoleh akan dianalisa dengan sistem deskriptif kualitatif dengan persentase, (Suharsimi Arikunto, 2002:209).

Setelah data terkumpul, maka data diklasifikasikan menjadi dua kelompok data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Terhadap data kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan. Sedangkan data yang berifat kuantitatif diproses dengan cara dijumlahkan lalu dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan lalu diperoleh persentase. Adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data yang diinginkan
2. Mengklasifikasikan alternative jawaban responden.
3. Menentukan besar persentase alternative jawaban responden dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = F/N \times 100\% \quad (\text{Sudijono, 2001: 40})$$

Hasil analisa dikelompokkan meneurut persentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan. Adapun tolak ukur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila responden yang menjawab A (Ya) Sebesar 51% - 100% = Ya
2. Apabila responden yang menjawab A (Ya) Sebesar 0% - 50% = Tidak

(Sutrisno Hadi, 1990: 229)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota Pekanbaru

Masyarakat yang berpartisipasi pada pemungutan suara ulang pemilihan Walikota adalah masyarakat yang tergolong dalam kategori berpartisipasi Mengajukan Usulan Kebijakan, Mengajukan Alternatif Kebijakan, Mengajukan Saran Untuk Mengoreksi Kebijakan, Mengajukan Kritik Untuk Mengoreksi Kebijakan, Mentaati Kegiatan Pelaksanaan, Mentaati Peraturan pelaksanaan, Menerima Setiap Ke[utusan, Melaksanakan Setiap Keputusan Pemerintah, Benar-Benar Memberikan Suara Sah, Yakin Memberikan Suara, Memperoleh Manfaat Untuk Diri Sendiri. Untuk itu penulis ingin mengetahui bentuk partisipasi masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai pada pemungutan suara ulang pemilihan Walikota Pekanbaru.

Setelah peneliti menyebarkan angket dan mengadakan wawancara kepada 76 responden yang masih tetap ikut berpartisipasi pada pemungutan suara ulang pemilihan Walikota Pekanbaru, peneliti mendapatkan alasan mengapa masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai masih tetap ikut berpartisipasi memberikan suara.

1. Mengajukan Usulan Kebijakan

Harus ada kesadaran dari masyarakat sebagai pendukung sebuah proses sistem pemerintahan untuk mengajukan usulan kebijakan kepada pemerintah seperti mengadakan pemungutan suara ulang, atau secara bijak menerima pemenang dalam pilkada putaran pertama berikut table 1:

Tabel 1

Mengajukan Usulan Kebijakan

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	52	68,42%
2	Tidak	24	31,58%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dari tabel diatas bahwa 24 dari 76 responden yang menjawab Tidak atau 31,58% dari jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar menjawab Ya (52 responden) atau 68,42% dalam mengajukan usulan kebijakan pada pemungutan suara ulang Walikota Pekanbaru.

Dari hasil wawancara yang menyatakan Tidak, responden berpendapat bahwa mereka tidak ada mengajukan usulan kebijakan politik karena alasan kejenuhan dalam memilih pemimpin. Sedangkan yang menjawab Ya karena pentingnya mengajukan usulan kebijakan politik untuk menumpuhkan harapan mereka terhadap pemimpin yang telah terpilih.

2. Mengajukan Alternatif Kebijakan

Pada zaman sekarang banyak orang yang berbicara tanpa memikirkan situasi dan kondisi. Namun masih ada cara untuk mengajukan alternatif kebijakan dengan sikap sopan, segan dan menjaga etika berbicara atau bertutur kata pada tempatnya. Apakah

sikap mengajukan alternatif kebijakan tersebut masih terdapat pada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2

Mengajukan Alternatif Kebijakan

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	47	61,84%
2	Tidak	29	38,16%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir seluruh Masyarakat Marpoyan Damai yang menjadi responden yakni 47 orang atau 61,84% Ya mengajukan alternatif kebijakan. 29 responden atau 38,16% menjawab Tidak.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap responden yang menjawab Tidak karena masyarakat tidak memiliki kebijakan alternatif dari setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Responden yang menjawab Ya beralasan bahwa setiap alternatif kebijakan yang di ajukan adalah aspirasi yang paling mewakili untuk masyarakat kecil.

3. Mengajukan Saran Untuk Mengoreksi Kebijakan

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung merupakan mekanisme politik yang melibatkan masyarakat untuk mengajukan saran untuk mengoreksi kebijakan, agar masyarakat ikut serta dalam setiap kebijakan pemerintah, dapat dilihat dari tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3

Mengajukan Saran Untuk Mengoreksi Kebijakan

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	61	80,26%
2	Tidak	15	19,74%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan hampir seluruh responden 61 orang (80,26%) Ya mengajukan saran untuk mengoreksi kebijakan dengan tindakan mengkritik tindakan keputusan pemerintah, 15 responden (19,74%) Menjawab Tidak.

Dari Hasil Wawancara peneliti, ternyata 15 orang responden tersebut, menilai mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan tersebut dari sisi tanggung jawab, seperti tanggung jawab pemerintah terhadap setiap kebijakan yang dibuat.

4. Mengajukan Kritik Untuk Mengoreksi Kebijakan

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung merupakan mekanisme politik yang melibatkan masyarakat untuk mengajukan kritik untuk mengoreksi kebijakan, agar masyarakat ikut serta dalam setiap kebijakan pemerintah, dapat dilihat dari tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4

Mengajukan Kritik Untuk Mengoreksi Kebijakan

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	55	72,36%
2	Tidak	21	27,64%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan hampir seluruh responden 55 orang (72,36%) Ya mengajukan kritik untuk mengoreksi kebijakan dengan tindakan mengkritik tindakan keputusan pemerintah, 21 responden (27,64%) Menjawab Tidak.

Dari Hasil Wawancara peneliti, ternyata 21 orang responden tersebut, menilai mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan tersebut dari sisi tanggung jawab, seperti tanggung jawab pemerintah terhadap setiap kebijakan yang dibuat.

5. Mentaati Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Yang Ditetapkan Pemerintah

Kegiatan pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah merupakan sarana untuk mengeluarkan aspirasi, kegiatan ini bersifat positif dari pemerintah kepada masyarakat untuk memilih ulang calon pemimpin yang sesuai dengan kriteria masyarakat. Hal ini terdapat pada tabel 5:

Tabel 5

Mentaati Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Yang Ditetapkan Pemerintah

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	63	82,9%
2	Tidak	13	17,10%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 63 responden (82,9%) menjawab mentaati peraturan pemerintah, 13 responden (17,10%) menjawab tidak. Alasan masyarakat tidak memahami dan mentaati setiap peraturan pemerintah.

Dari hasil wawancara responden yang dapat mentaati peraturan pemerintah karena mereka memahami peraturan hukum dan undang-undang. Sementara responden yang tidak memahami peraturan pemerintah melihat dari kondisi pada saat peristiwa tersebut yang telah terjadi dan sejauh mana aspirasi mereka tidak didengar.

6. Mentaati Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Setiap peraturan yang dibuat semestinya memang harus ditaati, begitu pula pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang yang telah dilaksanakan berlaklan oleh pemerintah dan masyarakat. Mentaati peraturan adalah hal yang menunjukkan sikap peduli dari segala ketentuan yang ada, hal ini terdapat pada tabel 6:

Tabel 6
Mentaati Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	64	84,21%
2	Tidak	12	15,79%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 64 responden (84,21%) menjawab Ya, Mentaati Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, 12 responden (15,79%) menjawab Tidak karena alasan mereka hanya kesia-siaan saja.

Dari hasil wawancara penelitian ternyata 43 responden yang Mentaati Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang merupakan hal yang penting karena mereka menganggap Pemungutan Suara Ulang adalah menentukan aspirasi dan nasib mereka.

7. Menerima Setiap Keputusan Pemerintah

Pemerintah mempunyai peran penting dalam memberikan setiap keputusan yang akan dilaksanakan, begitu juga sebaliknya masyarakat yang melaksanakan dan menjalani setiap keputusan dari pemerintah, hal ini terdapat pada tabel 7:

Tabel 7
Menerima Setiap Keputusan Pemerintah

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	59	77,63%
2	Tidak	17	22,37%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 59 responden (77,63%) menjawab Menerima dan Melaksanakan Setiap Keputusan Pemerintah, 17 responden (22,37%) menjawab Tidak karena alasan kepercayaan mereka terhadap pemimpin sudah berkurang dan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tindakan tersebut merupakan hal yang harus dibenahi karena bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk kedepannya.

Dari Hasil Wawancara ternyata 59 responden yang Menerima dan Melaksanakan Setiap Keputusan Pemerintah adalah sesuatu yang harus di patuhi dan dilaksanakan dengan semestinya.

8. Melaksanakan Setiap Keputusan Pemerintah

Pelaksanaan pemerintah termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana) termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka (masyarakat). Terdapat pada tabel 8:

Tabel 8
Melaksanakan Setiap Keputusan Pemerintah

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	53	69,73%
2	Tidak	23	30,27%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 53 responden (69,73%) Ya melaksanakan setiap keputusan pemerintah. 23 responden (30,27%) menjawab Tidak. Karena alasan setiap keputusan pemerintah belum tentu baik dan menguntungkan masyarakat.

Dari hasil wawancara penelitian masyarakat tidak melaksanakan setiap keputusan pemerintah karena setiap masyarakat bosan untuk terus dibohongi dan masyarakat tidak bodoh dalam melakukan setiap keputusan pemerintah.

9. Benar-benar Memberikan Suara Sah

Salah satu partisipasi masyarakat dalam pemilihan adalah dengan memberikan suara yang sah kepada setiap calon yang akan dipilih. Hal ini terdapat pada tabel 9:

Tabel 9
Benar – Benar Memberikan Suara Sah

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	61	80,26%
2	Tidak	15	19,74%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa 61 responden atau 79,03% menjawab Benar-benar memberikan suara sah dalam pemungutan suara ulang Walikota. Keseriusan masyarakat dalam memberikan suara dikarena masyarakat menganggap pemimpin harapan mereka yang mengerti dan memahami segala permasalahan masyarakat.

Dari hasil wawancara penelitian masyarakat lebih menganggap Pemungutan Suara Ulang adalah kegiatan yang benar-benar menentukan pilihan dan kepercayaan masyarakat terutama masyarakat kecil. Karena masyarakat yakin seburuk apapun pemimpin pasti ada tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

10. Yakin Memberikan Suara Kepada Pasangan Calon Walikota

Peserta pemilih harus benar-benar yakin dalam memberikan suara kepada pasangan calon walikota yang akan dipilih, karena setiap suara yang diberikan menyakut kepada nasib mereka. Dapat kita lihat pada tabel 10:

Tabel 10
Yakin Memberikan Suara Kepada Pasangan Calon Walikota

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	64	84,21%
2	Tidak	12	15,79%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lebih besar yang menjadi responden Yakin Memberikan Suara Kepada Pasangan Calon Walikota yang berjumlah 64 responden (84,21%), dan 12 responden (15,79%) ternyata tidak yakin memberikan suara.

Dari hasil wawancara penelitian masyarakat memberikan alasan bahwa tidak yakin memberikan suara kepada pasangan calon walikota pada saat pemungutan suara ulang karena responden menganggap sudah tahu siapa yang pasti menang dalam pemilihan tahap kedua. Dan hanya buang waktu kalau hanya ikut dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang.

11. Mencari Dukungan Bagi Seseorang Calon Walikota

Disini yang dimaksud adalah tim sukses / relawan dari setiap pasangan calon walikota dengan mencari dukungan untuk dukungan suara yang lebih. Sudah sewajar tim sukses melakukan hal yang demikian, dapat dilihat dari tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11
Mencari Dukungan Bagi Seseorang Calon Walikota

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	11	14,47%
2	Tidak	65	85,53%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dalam tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh Masyarakat Marpoyan Damai yaitu sebanyak 65 responden (85,53%) Tidak mencari dukungan bagi seseorang calon Walikota atau mencari dukungan diluar yang telah ditetapkan, namun masih ada 11 responden (14,47%) yang menyatakan Mencari dukungan untuk calon Walikota.

Dari hasil Wawancara diketahui bahwa responden yang menyatakan mencari dukungan mencari dukungan untuk calon Walikota karena ketika angket ini disebarakan jelas semua menyatakan Ya namun jika kerjasama itu didepan mata siapa yang bisa menjamin, sebab itulah jawaban Ya mencari dukungan menurut mereka saat ini lebih tepat, karena nantinya kesempatan tiap orang akan berbeda.

12. Memperoleh Manfaat Untuk Diri Sendiri

Pemungutan suara ulang yang dilaksanakan banyak mendapatkan manfaat bagi setiap kelompok atau perorangan, karena ini adalah kesempatan baik bagi masyarakat. Dapat dilihat dari tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Memperoleh Manfaat Untuk Diri Sendiri

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	68	89,47%
2	Tidak	8	10,53%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 68 responden (89,47%) Memperoleh manfaat bagi diri sendiri, 8 responden (10,53%) menjawab tidak memperoleh manfaat sama sekali. Bahkan mereka menyatakan tidak berarti apa-apa atau hal yang sia-sia saja.

Dari hasil wawancara responden yang menyatakan Tidak memperoleh manfaat hanya merupakan hal yang tidak berarti apa-apa, jadi bagi mereka pemungutan suara ulang untuk memenuhi keputusan pemerintah saja, dan tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

13. Memperoleh Manfaat Untuk Kelompok

Setiap kelompok tim kemenangan dari setiap pasangan calon memperoleh manfaat yang baik untuk kedepannya, hal ini terlihat lain kepada sekelompok masyarakat. Dapat kita lihat pada tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Memperoleh Manfaat Untuk Kelompok

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	27	35,52%
2	Tidak	49	64,48%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 49 responden (64,48%) Tidak Memperoleh Manfaat Untuk Kelompok, namun masih ada 27 responden (35,52%) Menyatakan Ya, karena ketika angket ini disebarkan jelas sebagian responden menyatakan memperoleh manfaat untuk kelompok, namun jika kerjasama itu didepan mata siapa yang bisa menjamin.

Dari hasil Wawancara ternyata responden yang memperoleh manfaat untuk kelompok melihat sisi yang baik dan ada unsur yang menguntungkan, jadi menurut mereka lebih baik memberikan dukungan atau ikut memilih walaupun tidak tahu bagaimana untuk kedepannya nanti.

14. Melakukan Tindakan Kekerasan

Di zaman reformasi pada saat ini tindakan kekerasan tidak lagi diketengahkan dalam masyarakat, melainkan dengan tindakan musyawarah. Dilihat dri tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Melakukan Tindakan Kekerasan

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	4	5,26%
2	Tidak	72	94,74%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa seluruh responden yakni 72 orang (94,74%) Tidak Melakukan Tindakan Kekerasan. Kemudian responden yang menjawab memelakukan tindakan kekerasan 4 orang (5,26%).

Dari hasil Wawancara 58 responden berpendapat sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang mereka Tidak pernah melakukan tindakan kekerasan. Inilah contoh demokrasi yang baik menurut mereka walaupun kemelut,kisruh pemungutan suara ulang terus diperdebatkan.

15. Dilobby Atas Keputusan

Lobby sering kali di gunakan untuk setiap tindakan upaya mempengaruhi keputusan yang diambil, seperti keputusan politik atau hal-hal yang dianggap penting. Dapat dilihat pada tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Dilobby Atas Keputusan

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	28	36,84%
2	Tidak	48	63,16%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 48 responden (63,16%) Tidak pernah di *lobby* atas keputusan mereka sebelum memilih calon Walikota pilihan mereka. Kemudian responden yang menjawab Ya 28 orang (36,84%) menyatakan bahwa mereka pernah di *lobby* oleh organisasi parpol yang mengusung salah satu pasangan calon Walikota untuk kemenangan calon Walikota tersebut.

Dari hasil wawancara ternyata 48 responden yang menyatakan Tidak di *lobby* pada saat memilih, jadi setiap masyarakat atau pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada yang mempengaruhi dari luar.

16. Ikut Dalam Kegiatan Organisasi

Kegiatan-kegiatan organisasi yang diikuti masyarakat seperti anggota parpol, swadaya masyarakat, dll. yang bertujuan mempengaruhi ataupun mengawasi setiap keputusanyang telah ditetapkan, terlihat pada tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Ikut Dalam Kegiatan Organisasi

No.	Jawaban Alternatif	F	%
1	Ya	32	42,10%
2	Tidak	44	57,9%
Jumlah		76	100%

Sumber : Data olahan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 44 responden (57,9%) Tidak ikut dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan partai politk, 32 responden (42,10%) Menjawab Ya. Karena sebagian besar masyarakat Sail adalah masyarakat umum dan pelajar, jadi tidak tahu atau tidak mengerti tentang organisasi partai politik.

Dari hasil wawancara dapat diperoleh bahwa mereka yang tidak ikut dalam kegiatan organisasi berpendapat bahwa, tidak semua orang memahami tentang organisasi, sehingga masyarakat ikut dalam kegiatan pemungutan suara ulang dari informasi dan diskusi-diskusi langsung atau sekedar bercerita membahas tentang pemilihan tersebut, walaupun tidak memahami tentang kegiatan organisasi

Uji Hipotesis

Hipotesis yang penulis ajukan adalah Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan Marpyon Damai Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota Pekanbaru adalah Memberikan Suara Sah.

Untuk mengetahui lebih jelas Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan Marpyan Damai Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 17 rekapitulasi jawaban responden berikut ini :

Tabel 17
Rekapitulasi Hasil Angket Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan Marpyon Damai Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota Pekanbaru

No. Tabel	Jawaban Responden				Jumlah	
	Ya		Tidak		N	%
	F	P(%)	F	P (%)		
1	52	68,42	24	31,58	76	100
2	47	61,84	29	38,16	76	100
3	61	80,26	15	19,75	76	100
4	55	72,36	21	27,64	76	100
5	63	82,9	13	17,10	76	100
6	64	84,21	12	15,79	76	100
7	59	77,63	17	22,37	76	100
8	53	69,73	23	30,27	76	100
9	61	80,26	15	19,74	76	100
10	64	84,21	12	15,79	76	100
11	11	14,47	65	85,53	76	100
12	68	89,47	8	10,53	76	100
13	27	35,52	49	64,48	76	100
14	4	5,26	72	94,74	76	100

15	28	36,84	48	63,16	76	100
16	32	42,10	44	57,9	76	100
Jumlah	755	985,48	467	614,54	1140	
Rata-rata	46		30		76	
Persentase		61,6%		38,40%		100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2012

Dari Tabel diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari 76 responden yang menyatakan Ya pada Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota Pekanbaru adalah 61,6% termasuk dalam ikut memberikan suara sah, dan yang menyatakan Tidak pada Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota Pekanbaru adalah 39,47%.

Dari 76 jumlah responden sebagai perwakilan populasi yang *notabenennya* adalah Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai Dalam Pemungutan Suara Ulang Walikota Pekanbaru, yang menyatakan Ya sebesar 61,6% , dan yang menyatakan Tidak sebesar 39,47%. Termasuk dalam kategori ikut memberikan suara, hal ini senada dengan teori (**Sutrisno Hadi, 1990 : 229**)

Dari hasil pengujian hipotesis diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah diterima, Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota Pekanbaru dari jawaban responden menjawab Ya adalah 61,6%, dan Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota Pekanbaru dari jawaban responden menjawab Tidak adalah 39,47%, karena berdasarkan tolak ukur dari bab III pendapat Sutrisno Hadi “menyatakan Jawaban persentase sebesar 51% - 100% = Ya, sebesar 0% - 50% = Tidak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota Pekanbaru menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai dengan persentase jawaban responden yaitu yang menjawab Ya sebesar 61,6% dan yang menjawab Tidak sebesar 38,40%. Hal ini di dukung oleh pendapat Sutrisno Hadi yang menyatakan bahwa 61,6% berada pada kisaran 51% - 100% ini artinya menurut Sutrisno Hadi bentuk partisipasi masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai adalah sebagai berikut: Mengajukan Usulan Kebijakan, Mengajukan Alternatif Kebijakan, Mengajukan Saran Untuk Mengoreksi Kebijakan, Mengajukan Kritik Untuk Mengoreksi Kebijakan, Mentaati Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mentaati Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Menerima Setiap Keputusan Pemerintah, Melaksanakan Setiap Keputusan Pemerintah, Benar – Benar Memberikan Suara Sah, Yakin Memberikan Suara Kepada Pasangan Calon Walikota, Memperoleh Manfaat Untuk Diri Sendiri

Jadi hipotesis yang menyatakan Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai Pada Pemungutan Suara Ulang Walikota Pekanbaru dapat diterima karena ikut memberikan suara sah dengan persentase jawaban responden (61,6%) = Ya.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal- hal sebagai berikut :

1. Agar pemerintah Kota Pekanbaru peduli dan memperhatikan kesejahteraan terhadap masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Pekanbaru tidak luntur.
2. Agar pemerintah Kota Pekanbaru bersikap adil, tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan dan dapat merealisasikan kewajibannya sebagai Aparatur Pemerintahan Kota.
3. Perlunya kesadaran memiliki hak dan kewajiban dari individu masyarakat itu sendiri dan pentingnya partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Sehingga masyarakat menganggap partisipasi itu bukan merupakan hal yang biasa.
4. Agar masyarakat selalu ikut atau mendengarkan diskusi-diskusi informal mengenai pelaksanaan Pemilu / Pilkada melalui televisi atau ikut secara langsung dan masyarakat meluangkan waktu untuk berpartisipasi pada Pemilu / Pilkada berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja grafindo Persada

Anas Sudjono. 2001. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan praktek edisi revisi V)*. Jakarta : Rineka Cipta. S

Budiarjo, Miriam. 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

Erlinda, Sri. 2009. *Sosiologi Politik*. Pekanbaru: Cendikia Insani

Rahamadi. 2006. *Partisipasi Masyarakat Galam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daah (Pilkada) Langsung di Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*. Skripsi. Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pekanbaru. Tidak di Terbitkan.

Sarundayung. 1997. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Harapan

Winataputra, Udin. S. dkk 2006. *Materi dan Pembelajaran SD (Edisi I)*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Undang_Undang No. 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum.

_____. 2008. *Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2008 (UU RI No. Th. 2008)*. Makassar: Sinar Grafika

http://haluanriaupress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3989%3Afirdaus-ayat_unggul&catid=1%3Alatest-news&Itemid=99&lang=en